

DAFTAR PUSTAKA

- Alhusain, Achmad Sani, dkk. 2018. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Edisi Kedua. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Amin Fadillah. 2019. *Penganggaran di Pemerintah Daerah dalam Perspektif Teoritis, Normatif, dan Empiris*. Edisi Pertama. Malang: UB Press.
- Andriani, R. Neneng Rina & Nisa Noor Wahid. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015)." *Jurnal Akuntansi Universitas Siliwangi*. Vol. 13, No. 1. Hal. 30-39.
- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Pertama. Malang: UB Press.
- Arpani, Wike Nurliza & Halmawati. 2020. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2018)." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Vol. 2, No. 1. Hal. 2373-2390.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Defitri, Siska Yulia. 2020. "Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat)." *Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 19, No. 02. ISSN: 2623-2480.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikasari, Putri. 2015. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di DIY Periode 2007-2014)." *Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Lestari, Anita, dkk. 2016. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara." *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*. Vol. 1, No. 2. ISSN: 2502-5171.
- Machfud, Asnawi, Naz'aina. 2020. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi

Aceh.” *Jurnal Manajemen Indonesia (J-MIND)*. Vol. 5, No. 1. ISSN: 2503-4367.

N Amalia, Afifah Fauziah & Haryanto. 2019. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017.” *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 8, No. 2. Hal. 1-13.

Ningrum, Nining. 2015. “Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung).” *Skripsi. Universitas Widyatama*.

Perawati. 2019. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.” *Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang*.

Prakarsa, Febrian Dwi. 2014. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012).” *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.

Pernyataan Herman Kepala Bapenda Riau dikutip dari laman website DDTC News. 2021, 18 Januari. “Genjot PAD, Pemprov Ini Tambah 10 Kantor Unit Pelayanan Bapenda.” Diakses pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 15.00 WIB dari <https://news.ddtc.co.id/genjot-pad-pemprov-ini-tambah-10-kantor-unit-pelayanan-bapenda-27059/>

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Anggaran.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Syahfitri, Evita. 2018. "Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Dana Otonomi Khusus sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh." *Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan*.

Wahyuni, Eny & Lilis Ardini. 2018. "Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 7, No. 6. ISSN: 2460-0585.

<https://www.bpk.go.id/> (diakses pada tanggal 11 Maret 2021).